

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BALAKANG

Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Pasal 3 Tahun 2003, Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab merupakan bagian dari tujuan pendidikan. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan IPS untuk menjadi warga negara yang baik dengan mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan sosial. Menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab yang merupakan bagian dari tujuan pendidikan tidak mudah untuk diwujudkan, manakala dalam proses pembelajaran yang demokratis tidak dikembangkan dan dilatih kepada siswa.

Indonesia merupakan bangsa yang tingkat heterogenitas atau kemajemukan penduduk yang tinggi cukup rentan terhadap perpecahan dan konflik, sehingga perlu adanya kesadaran akan hidup yang demokratis. Pemahaman dan kesadaran akan demokratis perlu dikembangkan dan dilatih bagi warga negara yang mejemuk, karena tidak mudah begitu saja dimiliki tanpa suatu proses melalui pembelajaran.

Proses terjadinya transformasi maupun mobilitas sosial serta perbauran dalam kehidupan masyarakat yang global tidak bisa dihindari, selain Indonesia sendiri sebagai bangsa yang majemuk dengan keanekaragaman budaya, etnis, agama, bahasa, dan suku bangsa juga dalam pergaulan dunia yang didukung oleh media informasi yang maju sebagai dampak perkembangan teknologi cukup berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dalam perubahan sosial maupun perubahan budaya. Hal ini berimplikasi pada setiap daerah di Indonesia termasuk di Jawa Barat sampai kepada kabupaten dan kota yang ada di wilayah Jawa Barat.

Jawa Barat merupakan salah satu propinsi terbesar di Indonesia, dengan luas wilayah 29.275,82 km². Secara administratif pemerintahan, Jawa Barat punya 25 kabupaten dan kota, yang terdiri dari 16 kabupaten dan 9 kota, mencakup 535 kecamatan, 1.724 kelurahan, dan 3.939 desa. Jumlah penduduk Jawa Barat berdasarkan Susenas 2002 berjumlah 36,9 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk selama kurun waktu 1999-2000 mencapai 2,17% per tahun. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Jawa Barat disebabkan oleh dua hal, yakni pertumbuhan penduduk alamiah dan migrasi. Laju pertumbuhan yang disebabkan oleh migrasi lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk alamiah. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap tingkat heterogenitas penduduk Jawa Barat yang cukup tinggi (PR, 28-11-03).

Tingkat kemajemukan penduduk yang tinggi cukup rentan terhadap perpecahan dan konflik, Danny Setiawan Gubernur Jawa Barat mengatakan bahwa:

Jawa Barat sebagai propinsi berbatasan dengan Jakarta tidak terlepas dari ancaman perpecahan. Pasalnya, suatu perpecahan di tengah masyarakat bisa timbul manakala berkembang sentimen kesukuan, agama, dan primordial yang terlalu berlebihan. Jika faktor tersebut sulit dicegah dan diantisipasi, upaya mempertahankan konsep persatuan dan kesatuan yang telah menjadi wawasan kebangsaan akan menjadi berat. Bahkan, dampak perpecahan tersebut tidak akan menguntungkan bagi kondisi Jawa Barat ke depan (www.pikiran-rakyat.com/cetak/1003/22/0305.htm).

Jawa Barat memiliki tingkat kemajemukan beragama yang cukup tinggi, begitupun Garut yang merupakan bagian dari propinsi Jawa Barat sama tingkat mobilitas dan interaksi antar umat beragama maupun diantara umat seagama cukup tinggi pula yang berpotensi melahirkan berbagai problema sosial terutama konflik. Konflik yang pernah terjadi di Garut Seperti tawuran antar kampung di Corenda, Patrol di wilayah Leles, di Mancagahar dan daerah lainnya. kadang seringkali terjadi. Perselisihan dan konflik antar golongan (mazhab) yang pernah terjadi seperti di Selaawi dan Gandasari kadang tak bisa dihindari.

Permasalahan tersebut di atas merupakan kondisi yang cukup mengkhawatirkan bagi pembangunan sumber daya manusia yang demokratis di Garut khususnya, Jawa Barat dan Indonesia pada umumnya. Seperti diungkapkan oleh Setiawan (2003) bahwa : “perpecahan dan konflik akan mudah dipicu oleh sentimen kesukuan, fanatisme agama yang sempit, belum berbaurnya WNI keturunan sebagai bangsa Indonesia secara utuh” (Parahyangan, 11-8-2003).

Untuk menghindari konflik yang tidak diharapkan seperti di atas perlu adanya peningkatan pendidikan yang berhubungan dengan sikap demokratis kepada generasi muda, karena pendidikan memiliki peran yang cukup strategis terutama pendidikan IPS dalam membentuk warga negara yang baik. Hal ini

merupakan tantangan berat bagi dunia pendidikan di Jawa Barat dan Garut khususnya dengan kualitas pendidikan yang masih dalam tataran sedang.

Indek pendidikan di Jawa Barat dan Garut pada tahun 1999, indeks pendidikan Jabar tercatat 73,90 dan pada 2002 menjadi 76,51 atau naik 2,61%. Sementara di Kabupaten Garut, Indeks pendidikan kabupaten Garut sebesar 78,31 pada 1999 dan 78,69 pada 2002 (berarti naik 0,38), termasuk sedang namun tergolong dinamis, yaitu indeks pendidikannya termasuk sedang (dalam klasifikasi UNDP) namun terus mengalami peningkatan pesat, baik tingkat pertumbuhan dan juga *ranking* indeks pendidikannya. Jumlah penduduk usia sekolah dasar (7-12 tahun) termasuk sedang, APM menurut UNDP maupun APM Jawa barat termasuk kategori tinggi. Jumlah penduduk usia sekolah menengah pertama (13-15 tahun) termasuk sedang. Tingkat APM menurut UNDP maupun Jawa Barat termasuk kategori sedang. Untuk tingkat SMU dan SMK, jumlah penduduk umur 16-18 tahun atau usia produktif sekolah untuk kabupaten Garut termasuk sedang. APM-nya menurut UNDP tergolong rendah. *Ranking* indeks pendidikan pada 1996 pada peringkat ke-12 dan menjadi peringkat ke-9 pada 1999 di antara daerah lainnya di Jawa Barat (PR, 16-12-2003).

Menurut data statistik BPS Kabupaten Garut (2003) lama sekolah di Kabupten Garut dari tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001 dan tahun 2002, yaitu : rata-rata 6,20 tahun , 6,40 tahun, 6,50 tahun, dan 6,7 tahun. Berarti kalau dilihat rata-rata lama sekolah di Kabupaten Garut sampai tahun 2002 tidak tamat SMP. Hal ini didukung pula dengan angka tamatan SD yang tidak melanjutkan ke SMP

setiap tahun. Selain itu banyaknya gedung-gedung sekolah yang rusak dan fasilitas sekolah lainnya yang belum memadai.

Terjadinya kenaikan indeks pendidikan tersebut belum ditunjang dengan kenaikan kualitas manusianya sebagai anak didik yang dapat mengembangkan potensi dirinya sebagai bekal dalam kehidupannya. Untuk itu perlu mencari solusi berembuk dari berbagai pihak, baik pemerintah, pengelola pendidikan maupun masyarakat.

Proses pendidikan yang menyentuh potensi kognitif, afektif dan psikomotor siswa perlu terus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas proses pendidikan.

Sebagaimana pendidikan IPS yang masih dianggap materi pembelajaran yang membosankan, dan pembelajaran Sejarah yang merupakan bagian dari PIPS yang terjadi selama ini cenderung kurang menarik dan membosankan, karena proses pembelajaran yang didominasi oleh guru (*teacher dominated*) dengan menyampaikan fakta-fakta secara kronologis, siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran. Padahal dikatakan oleh Kuntowidjoyo (1997:3-4) bahwa :

Pengajaran sejarah pada setiap tingkatan seharusnya mempunyai pendekatan yang berbeda sehingga tidak membosankan akibat banyaknya kesamaan dan pengulangan. Untuk tingkat SMU, ia mengatakan bahwa pengajaran sejarah sebaiknya diberikan secara kritis mengingat siswa sudah mampu bernalar. Siswa diharapkan sudah bisa berpikir mengapa sesuatu terjadi, apa sebenarnya yang terjadi dan ke mana arah kejadian-kejadian tersebut.

✓ Belajar sejarah menurut Sjamsuddin (1999:15) bahwa : “siswa bukan hanya memahami apa yang telah terjadi, melainkan pula mengapresiasi masa

lalu". Untuk itu siswa dituntut untuk empati dan mengepreasi terhadap orang yang dikisahkan dalam sejarah prestasinya atau penderitaan-penderitaan.

Hasan (1999:7) mengemukakan bahwa : Kemampuan dan sifat kepribadian tersebut dikembangkan melalui kemampuan berpikir kronologis dan sikap toleran. Selanjutnya dijelaskan bahwa :

Kondisi pembelajaran sejarah yang berkembang di dunia persekolahan dewasa ini, dapat dideskripsikan sebagai berikut : bahwa merupakan suatu kenyataan yang harus diakui proses pengembangan kemampuan berpikir kronologis yang merupakan kemampuan berpikir dasar dalam sejarah maupun sikap toleransi yang dikembangkan baru sebagai "*nurturant effect*" dan bukan sebagai suatu "*instructional effect*" proses pengajaran sejarah yang terjadi tidak memberi kesempatan bagi guru untuk merancang pengembangan kualitas kesejarahan ini dalam suatu proses pendidikan yang adekuat.

Selain itu budaya paternalistik dan feodal cukup mempengaruhi juga dalam proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran yang demokratis masih perlu dikembangkan. Untuk itu dalam pendidikan sejarah perlu adanya peningkatan pembelajaran yang lebih demokratis, sehingga dengan pembelajaran yang demokratis diharapkan siswa dalam kehidupannya dapat mengembangkan sikap/nilai yang demokratis. Pendidikan IPS termasuk sejarah sarat dengan nilai yang didukung fakta sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik (Susilo, 2000:71). Begitupun dalam materi sejarah banyak yang kontroversi untuk dikembangkan dalam proses pembelajaran yang dapat melibatkan siswa, sehingga proses pembelajaran dapat melatih dan mengembangkan sikap demokratis siswa.

Untuk menjawab problematika pembelajaran sejarah di atas, Hasan (1999: 9) menjelaskan bahwa :

Pengajaran sejarah seharusnya dikembangkan dengan menempuh tiga pendekatan yaitu : 1) keterkaitan pelajaran sejarah dengan kehidupan sehari-hari siswa, 2) pemahaman dan kesadaran akan karakteristik cerita sejarah yang tidak pernah bersifat final, 3) perluasan tema sejarah politik yang menguasai sebagian besar isi mata pelajaran sejarah saat ini dengan tema sejarah sosial, budaya, ekonomi dan teknologi.

Begitupun pendidikan dan pembelajaran IPS kenyataannya pada saat ini masih lemah dalam pengembangan aspek kognitif, afektif dan psikomotor siswa. Untuk itu perlu adanya solusi yang dapat mengembangkan ketiga aspek tersebut di atas dalam proses pembelajaran yang demokratis dalam pengembangan sikap demokratis siswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang berdampak pada pengembangan keterampilan intelektual siswa (*intellectual skills*), yaitu kemampuan dalam mengembangkan pola berfikir yang kritis, kreatif, inovatif dan positif yang berimplikasi terhadap keterampilan sosial siswa (*social skills*) seperti memiliki sikap demokratis dengan menghargai akan perbedaan pendapat, budaya, etnis dan agama, sehingga dapat hidup saling berdampingan dan kebersamaan dengan persatuan dan kesatuan bangsa yang mampu berdiri dalam kebhinekaan.

Kemajemukan suku bangsa menuntut kesadaran kepada kita untuk senantiasa hidup berdampingan dengan perbedaan sistem mata pencaharian, bahasa, sistem religi kesenian dan lainnya. Masing-masing suku bangsa ini memiliki bahasa, asas-asas organisasi sosial, sistem religi dan kesenian yang berbeda (Koentjaraningrat, 1986: 30).

Menurut Tilaar, (1999:351) bahwa “kehidupan masyarakat global menuntut setiap orang untuk mampu berpikir cepat dan jernih, sehingga mampu mengantisipasi berbagai perubahan dan tantangan yang berkembang dengan cepat”. Selanjutnya dikatakan bahwa “kehidupan global juga telah menghadirkan



tantangan baru kepada setiap masyarakat menyangkut nilai-nilai kebangsaan dan identitas bangsa sendiri” (Tilaar, 1999:353). Apalagi sekarang di era globalisasi dengan di dukung oleh perkembangan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu alat transportasi dan komunikasi yang semakin maju mobilisasi sosial secara vertikal dan horizontal bukan hanya bergaul antar suku di dalam suatu negara, tetapi lintas bangsa dengan negara-negara lain yang menuntut untuk senantiasa hidup berdampingan antar etnik dan ras dengan latar belakang sosio kultur yang berbeda. Untuk itu sikap demokratis perlu dibangun dan dilatih sedini mungkin terhadap anak didik. Menurut (Winataputra, 2001) :

Seluruh warga negara dituntut untuk meningkatkan kedewasaan sehingga mereka mampu berfikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan cita-cita, nilai dan prinsip demokrasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas kehidupan demokratis di Indonesia. Kebutuhan ini dirasakan sangat mendesak, karena hal itu diperkuat oleh kenyataan bahwa ketidakmatangan dalam berfikir, bersikap, dan bertindak demokratis itu ternyata di alami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Proses pembelajaran yang demokratis sekarang ini menjadi tuntutan dalam peningkatan kualitas demokratis yang menjadi bagian dari tujuan pendidikan menurut UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Pasal 3 Tahun 2003. Hal ini seiring dengan digulirkannya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang dilaksanakan di beberapa sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.

Selain itu budaya paternalistik dan feodal cukup mempengaruhi juga dalam proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran yang demokratis masih perlu dikembangkan. Untuk itu dalam pendidikan sejarah perlu adanya peningkatan pembelajaran yang lebih demokratis, sehingga dengan pembelajaran yang

demokratis diharapkan siswa dalam kehidupannya dapat mengembangkan sikap/nilai yang demokratis.

Di era reformasi dimana tuntutan demokrasi semakin kuat dan menjadi isu internasional, tetapi dalam kenyataan di masyarakat Indonesia terjadi konflik-konflik sosial atau perusakan, seperti perusakan fasilitas umum peristiwa bulan Mei 1998 di Jakarta, sikap mau menang sendiri, konflik di Ambon antara penganut agama, pertikaian antar suku di Kalimantan Barat dan lainnya. Hal ini menurut (Winataputra, 2001) karena : belum matangnya berdemokrasi, juga kini nampak gejala tumbuhnya kecenderungan mengatasnamakan demokrasi untuk membenarkan tindakannya, meskipun bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi itu sendiri.

Melihat kecenderungan seperti itu diperlukan sekarang ini pendidikan demokrasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian pendidikan demokrasi perlu ditanamkan sedini mungkin kepada generasi muda, terutama dalam menghadapi pergaulan dan persaingan global.

Dalam rangka membangun demokrasi di Indonesia pada era reformasi dan globalisasi, dimana tuntutan demokrasi dan HAM semakin kuat dari masyarakat perlu peningkatan pendidikan demokrasi di sekolah. Menurut Wiriaatmadja, (2001) :

Secara individual anak memasuki pendidikan dengan latar belakang yang berbeda dalam asal usul, kebiasaan, bahasa, temperamen, bahkan tujuan. Melalui proses interaksi dan upaya pengasuhan, pemeliharaan dan peningkatan dalam berfikir, berperilaku dan sikap tertentu kepada yang bersangkutan diajarkan dan didikan sejumlah pengetahuan, sikap dengan bekerjasama dan respon pihak peserta didik dapat ditumbuhkan dan dihasilkan pribadi-pribadi yang dewasa, yang memiliki pengetahuan, perilaku dan sikap yang diharapkan.



SMUN I Tarogong merupakan salah satu institusi pendidikan memiliki peranan yang penting dan strategis untuk menyiapkan dan mengarahkan siswanya menjadi generasi yang mampu berpikir jernih dan berwawasan tinggi dalam mengembangkan nilai-nilai sikap demokratis dalam kehidupannya.

Sehubungan dengan itu, pembelajaran Sejarah memiliki peranan penting dalam membangun karakter bangsa (*nations and character building*) khususnya yang berkualitas yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi dan mampu bersaing dalam pergaulan dunia. Pembelajaran merupakan wahana bagi siswa melakukan interaksi dalam kehidupan akademis untuk mengembangkan potensinya. Begitupun dalam proses pendidikan Sejarah perlu adanya suatu interaksi yang baik antara peserta didik dengan pendidik supaya tujuan pembelajaran tercapai. Proses pendidikan sejarah adalah kegiatan yang dilakukan seorang pendidik dan peserta didik dalam suatu interaksi dengan sumber belajar sehingga tujuan pembelajaran tercapai (Hasan, 2003 : 307) .

Sejarah memiliki sumber belajar yang cukup luas sekali di kelas maupun di luar kelas, seperti kehidupan masyarakat dengan ragam ceritanya atau lingkungan akademis siswa sendiri. Guru jarang menggunakan sumber belajar dari lingkungan, sehingga membuat pembelajaran Sejarah menjadi monoton dan terpaku pada buku sumber semata. Salah satu sumber belajar sejarah adalah materi isu-isu kontroversial yang diharapkan mampu melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan sikap demokratis siswa.

Indonesia merupakan masyarakat yang pluralis, begitupun dalam substansi (materi) sejarah terjadi pula kontroversi dalam peristiwa-peristiwa tertentu.

Namun guru sejarah dalam proses pembelajaran masih jarang melibatkan siswa untuk mengkajinya dan memanfaatkan sebagai sarana pendidikan demokrasi. Untuk itu dengan pembelajaran sejarah melalui *cooperative learning* bagaimana dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Dengan pembelajaran sejarah melalui *cooperative learning* diharapkan siswa belajar hidup berbeda pendapat dan belajar kerja sama, sehingga nilai-nilai demokrasi tertanam sedini mungkin. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat dapat dipahami dan diimplementasikannya. Hal ini sangat berhubungan erat sekali dengan peningkatan kualitas pendidikan sejarah.

Hal ini akan merubah dari proses belajar mengajar (PBM) sejarah atau IPS yang cenderung membosankan dan kurang mengembangkan nilai-nilai demokratis akan beralih kepada proses belajar yang lebih demokratis serta siswa akan lebih aktif dan kreatif.

Pendidikan sejarah merupakan bagian dari pendidikan IPS, dimana dalam materi sejarah itu sendiri ada materi yang kontroversial, seperti peristiwa G30S/PKI, Dekrit Presiden 1959 dan lainnya. Untuk itu perlu dalam proses pembelajaran sejarah melatih siswa untuk berbeda pendapat. Seperti dikemukakan oleh Hasan (1996 : 202) :

... keuntungan lain yang dapat diperoleh melalui pendapat yang berbeda, orang dapat mengembangkan pendapat baru yang lebih baik. Di sini terjadi proses analogis dan sintesis dalam berpikir. Atas perbedaan pendapat itu, dinamika kehidupan akademik dan sosial terjalin dengan baik. Siswa yang terbiasa dengan berbagai pandangan yang berbeda akan dapat menempatkan dirinya dan menyumbangkan pemikirannya sebagai anggota masyarakat secara baik. Perbedaan pendapat yang sering mereka alami di kelas, akan pula menjadi dasar bagi mereka untuk terbiasa dengan kondisi semacam itu, sehingga ketika mereka menjadi anggota masyarakat, mereka tidak lagi merasa terasing .

Untuk itu melalui *cooperative learning* dalam pembelajaran sejarah upaya membangun, mengembangkan dan melatih demokrasi siswa dapat ditingkatkan. Dengan demikian diperlukan suatu penelitian tindakan yang dapat bermanfaat dalam pendidikan sejarah.

Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian tindakan yang berjudul : **PEMBELAJARAN SEJARAH MELALUI *COOPERATIVE LEARNING* DALAM PENINGKATAN SIKAP DEMOKRATIS SISWA** (Penelitian Tindakan Kelas Pada Pembelajaran Sejarah di kelas III IPS 2 SMUN 1 Tarogong Garut)

B. RUMUSAN MASALAH

Banyak faktor yang menimbulkan siswa kurang memahami dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi, kreatif, dan kebersamaan. Faktor penyebabnya ini bisa disebabkan oleh guru, siswa sendiri, kurikulum maupun lingkungan. Untuk itu dalam penelitian ini masalah yang akan hendak diteliti perlu dibatasi, yaitu kemungkinan masalah yang berasal dari guru dalam pelaksanaan pembelajaran.

Permasalahan yang akan dikaji lebih tajam adalah dalam permasalahan :

1. Bagaimana pembelajaran sejarah ditampilkan oleh guru dengan menggunakan pendekatan *cooperative learning* ?
2. Apakah pembelajaran sejarah dengan menggunakan pendekatan *coperative learning* dapat mengembangkan sikap demokratis siswa ?

3. Kendala-kendala apa yang dihadapi guru dalam pembelajaran sejarah dengan menggunakan pendekatan *cooperative learning* dalam mengembangkan sikap demokratis siswa ?

C. DEFINISI OPERASIONAL

Berpijak dari permasalahan tersebut di atas untuk memperoleh kesamaan pandangan dan menghindari penafsiran yang berbeda dalam penelitian ini, maka dibuat batasan yang akan dipergunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Sikap Demokratis

Sikap demokrasi dalam penelitian ini yaitu perbuatan atau sikap siswa yang didasarkan pada pendirian mendukung atau tidak memihak dengan didasarkan kepada kesadaran akan perbedaan dan kemajemukan. Dengan demikian data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berkaitan dengan aktivitas siswa pada saat pembelajaran di kelas maupun di luar kelas, hal ini meliputi sikap baik berupa kata-kata, mimik raut muka, dan atau segala tindakan serta reaksi siswa yang bersifat baik ataupun buruk.

2. Model *Cooperative learning*

Model *cooperative learning* yang dikembangkan dalam penelitian ini berupa model dan pendekatan pembelajaran yang lebih menekankan kepada kegiatan belajar siswa secara kelompok. Model kegiatan belajar secara kelompok ini dikembangkan dalam upaya mengetahui sikap dan tindakan siswa. Dengan demikian data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berkaitan dengan kekompakan, kebersamaan, partisipasi, kemampuan mengembangkan gagasan

kelompok, kemampuan mempertahankan argumentasi kelompok, serta sikap responsif terhadap pendapat anggota kelompok lainnya.

Selanjutnya yang dimaksud dengan kendala-kendala yang dihadapi guru dalam pengembangan model *cooperative learning* ini untuk meningkatkan sikap demokratis siswa, adalah hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan sehingga *cooperative learning* ini susah untuk diimplementasikan dalam pembelajaran berkaitan dengan upaya peningkatan sikap demokratis siswa. Adapun kendala-kendala tersebut meliputi keterbatasan waktu dan media atau sumber belajar, kurang terbiasanya guru mengangkat hal atau peristiwa aktual.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Atas dasar latar belakang dan permasalahan penelitian secara umum sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu, maka :

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendapatkan bukti penerapan model *cooperative learning* dalam pembelajaran sejarah di SMA yang ditampilkan oleh guru.
2. Untuk mengetahui pengaruh *cooperative learning* dalam pembelajaran sejarah di SMA terhadap sikap demokratis siswa..
3. Untuk menemukan kendala-kendala yang dihadapi guru dalam pembelajaran sejarah di SMA dengan menggunakan model *cooperative learning*.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan guru khususnya yang mengajar sejarah dan umumnya bagi guru-guru

pendidikan IPS di Sekolah Menengah Umum. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

a. Manfaat Teoritis

1. Mendapatkan data empirik untuk model *cooperative learning* yang dapat menjadi sebuah model pembelajaran sejarah guna meningkatkan sikap demokratis siswa.
2. *Cooperative learning* bisa menjadi sebuah pilihan model pembelajaran bagi para pendidik sejarah yang cukup signifikan dan dinamis dalam membantu mempermudah menyampaikan materi pelajaran.

b. Mnafaat Praktis

1. Sebagai masukan dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran untuk menjadi guru sejarah yang profesional.
2. Diharapkan dapat memberikan wawasan untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengembangkan model pembelajaran yang berorientasi kepada pengembangan sikap demokratis siswa pada pokok bahasan.
3. Siswa diharapkan akan mendapatkan pengalaman dalam proses pembelajaran yang dapat mengembangkan *social skills*, khususnya dalam aspek perbedaan pendapat, aspek kerjasama, aspek kepemimpinan, dan aspek nilai-nilai demokratis.
4. Bagi peneliti lain hasil temuan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk mengadakan perbaikan dan penyempurnaan penelitian lanjutan.